



JURNAL ILMIAH

Akuntansi Publik, Manajemen dan Perbankan

Journal website: <https://jiapmp.hellowpustaka.id/index.php/i/index>

ISSN: 3089-4042 (Online)

<https://doi.org/10.61166/jiapmp.v2i1.24>

Vol. 2 No. 1 (2026)

pp. 134-142

Research Article

Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Siti Ani Rahmi¹, Sumaji², Mohammad Rosyidi³, Rahmania⁴

1. Program Studi S1 Akuntansi, STIE Al Anwar Mojokerto, Indonesia
2. STIE Al Anwar Mojokerto, Indonesia
3. STIE Al Anwar Mojokerto, Indonesia
4. STIE Al Anwar Mojokerto, Indonesia

Correspondent: siti42ani@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Manajemen dan Perbankan. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : Des 15, 2025

Revised : Des 20, 2025

Accepted : Jan 05, 2026

Available online : Feb 13, 2026

How to Cite: Rahmi, S. A. (2026). Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Manajemen Dan Perbankan*, 2(1), 134-142. <https://doi.org/10.61166/jiapmp.v2i1.24>

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Dana Desa sebagai instrumen pembangunan memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah dilaksanakan secara prosedural melalui musyawarah desa, pemasangan papan informasi kegiatan dan anggaran, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Namun, transparansi tersebut belum sepenuhnya bersifat substantif karena masih terdapat keterbatasan dalam penyebaran informasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan anggaran.

Partisipasi masyarakat yang belum merata serta kapasitas aparatur desa dalam komunikasi publik menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas transparansi.

Kata Kunci: Transparansi Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, termasuk pada tingkat desa (Syaipudin, 2019). Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah adanya alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (A. A. A. Putri et al., 2021).

Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya dalam bidang infrastruktur (Syaipudin, 2023). Pembangunan jalan desa, jembatan, drainase, fasilitas umum, dan sarana prasarana lainnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperlancar aktivitas ekonomi. Dengan adanya Dana Desa, pemerintah desa memiliki peluang yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal (Aprilia, 2019).

Namun demikian, besarnya anggaran yang dikelola desa juga menuntut adanya sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Transparansi menjadi prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa (Hakim et al., 2025). Kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan anggaran, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Apabila informasi terkait penggunaan dana tidak disampaikan secara terbuka, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat menurun. Oleh karena itu, transparansi menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas dan efektivitas pembangunan desa (Chandra & Efendi, 2024).

Pembangunan infrastruktur, transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan (Syaipudin & Awwalin, 2022). Musyawarah desa, papan informasi anggaran, serta publikasi laporan realisasi kegiatan merupakan beberapa bentuk implementasi transparansi yang dapat dilakukan (I. A. K. Putri et al., 2025). Partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu menciptakan kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan (Yanto et al., 2023).

Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu desa penerima Dana Desa telah melaksanakan berbagai program pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana masyarakat. Pembangunan tersebut meliputi perbaikan jalan desa, pembangunan drainase, fasilitas umum, serta sarana pendukung lainnya yang diharapkan mampu memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial warga. Keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu indikator keberhasilan pemanfaatan Dana Desa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan fisik tidak hanya diukur dari hasil yang terlihat, tetapi juga dari bagaimana proses pengelolaan dana tersebut dilakukan. Prinsip transparansi menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam, karena menyangkut keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Tingkat transparansi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pembangunan.

Kondisi sosial dan dinamika pemerintahan desa turut memengaruhi tingkat keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Faktor seperti kapasitas aparatur desa dalam mengelola administrasi, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi penentu efektivitas transparansi. Apabila sistem pengelolaan belum berjalan secara optimal, maka berpotensi menimbulkan miskomunikasi atau ketidakjelasan informasi di tengah masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif (Sutanto & Hardiningsih, 2021). Persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintah desa juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan desa. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa akan memengaruhi partisipasi dan pengawasan yang dilakukan. Semakin tinggi keterbukaan informasi, semakin besar pula peluang terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat (Mada et al., 2017).

Analisis mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Medali menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana prinsip keterbukaan telah diterapkan dalam praktik pemerintahan desa. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga menyangkut kemudahan akses, kejelasan penyampaian, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi bentuk-bentuk transparansi yang telah dijalankan oleh pemerintah desa, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini juga penting untuk mengungkap berbagai kendala yang dihadapi

dalam penerapan transparansi. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya sistem administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, maupun rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan mengetahui faktor-faktor penghambat tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mendalam mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto menjadi suatu kebutuhan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi tata kelola Dana Desa di tingkat lokal serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan akuntabilitas dan kualitas pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang lebih terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, mekanisme, serta persepsi masyarakat dan aparatur desa terkait keterbukaan informasi dan pengelolaan anggaran. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, serta perwakilan masyarakat yang dianggap mengetahui proses pengelolaan Dana Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan teknik agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Syaipudin, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Medali merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur, mengelola, dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dan bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Struktur ini berperan penting dalam memastikan setiap program dan kebijakan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa Medali memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Tanggung jawab tersebut menuntut adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi agar dana yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah desa tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pengelola keuangan publik yang harus terbuka dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Medali telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya pada pembangunan infrastruktur. Bentuk transparansi yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan musyawarah desa (musdes) dalam tahap perencanaan, pemasangan papan informasi kegiatan dan anggaran, serta penyampaian laporan realisasi pada forum tertentu. Secara administratif, pemerintah desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

Tahap perencanaan, pemerintah desa melibatkan unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, RT/RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Musyawarah desa menjadi wadah untuk menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur yang dianggap prioritas, seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, dan renovasi fasilitas umum. Partisipasi ini menunjukkan adanya upaya keterbukaan dalam menentukan arah pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat (Pamela et al., 2021).

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Tidak semua warga hadir atau aktif menyampaikan pendapat dalam musyawarah desa. Beberapa informan menyampaikan bahwa informasi terkait jadwal musyawarah terkadang belum tersebar secara luas, sehingga hanya sebagian masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses perencanaan.

Aspek pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa telah memasang papan informasi proyek yang memuat jenis kegiatan, volume pekerjaan, serta besaran anggaran yang digunakan (Syaipudin & Luthfi, 2025). Langkah ini dinilai sebagai bentuk transparansi visual yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Keberadaan papan informasi tersebut membantu masyarakat mengetahui sumber dan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur (Setyobakti et al., 2018).

Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap rincian anggaran masih tergolong terbatas. Sebagian masyarakat hanya mengetahui adanya pembangunan fisik tanpa memahami secara detail perencanaan anggaran dan proses pelaporannya. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi informasi belum

sepenuhnya diiringi dengan peningkatan literasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa (Purnomo et al., 2021).

Tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun laporan realisasi anggaran sesuai ketentuan dan melaporkannya kepada pihak terkait. Secara formal, mekanisme pelaporan telah berjalan dengan baik dan terdokumentasi. Akan tetapi, penyampaian laporan kepada masyarakat secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan agar informasi tidak hanya berhenti pada tingkat administratif, tetapi juga dipahami oleh warga desa (Purnamaningtyas et al., 2024).

Pembahasan dari temuan ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Medali telah dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari tersedianya dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes, pelaksanaan kegiatan yang disertai papan informasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban yang disusun secara administratif. Secara formal, pemerintah desa telah memenuhi kewajiban regulatif dalam mengelola dan melaporkan penggunaan Dana Desa, sehingga dari sisi aturan, mekanisme transparansi telah dijalankan.

Namun demikian, transparansi yang bersifat prosedural belum sepenuhnya mencerminkan transparansi substantif. Transparansi substantif tidak hanya menekankan pada ketersediaan dokumen atau laporan, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dapat memahami isi, maksud, serta rincian informasi yang disampaikan (Ramadhan & Anwar, 2022). Dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti alur pengelolaan anggaran maupun rincian penggunaan Dana Desa, sehingga akses informasi belum sepenuhnya bermakna. Perbedaan antara transparansi prosedural dan substantif menjadi poin penting dalam evaluasi tata kelola Dana Desa. Pemerintah desa perlu tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami, terbuka, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya seperti penyederhanaan bahasa laporan, sosialisasi yang lebih intensif, serta pemanfaatan media informasi yang efektif dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan transparansi yang lebih substantif dan partisipatif.

Faktor kapasitas aparatur desa juga menjadi salah satu aspek yang memengaruhi tingkat transparansi. Kemampuan dalam pengelolaan administrasi, penggunaan teknologi informasi, serta komunikasi publik sangat menentukan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Apabila kapasitas sumber daya manusia terbatas, maka implementasi transparansi dapat berjalan kurang optimal (Eka et al., 2021).

Budaya partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya transparansi pengelolaan Dana Desa. Masyarakat yang aktif bertanya, memberikan masukan, serta terlibat dalam forum-forum desa seperti

musyawarah desa akan memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan. Keterlibatan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga mendorong pemerintah desa untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka transparansi yang telah diupayakan pemerintah desa menjadi kurang efektif karena tidak memperoleh respons, masukan, maupun evaluasi dari warga (Nugroho & Apatya, 2023).

Transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan adanya upaya keterbukaan melalui mekanisme musyawarah, publikasi anggaran, serta pelaporan kegiatan. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penyebarluasan informasi yang lebih merata dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isi dan proses pengelolaan anggaran. Penguatan partisipasi publik menjadi kunci agar transparansi tidak hanya bersifat administratif atau formalitas semata, melainkan benar-benar mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan secara prosedural melalui musyawarah desa, pemasangan papan informasi anggaran, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, transparansi tersebut belum sepenuhnya bersifat substantif karena masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan anggaran. Partisipasi masyarakat yang belum merata serta kapasitas aparatur desa dalam menyampaikan informasi juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas transparansi.

REFERENSI

- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2).
- Chandra, L. P., & Efendi, D. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Efektifitas Kerja Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Publik Dimoderasi Transparansi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(4).
- Eka, L., Bappeda, S., Litbang, D., & Wonogiri, K. (2021). Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Wonogiri.

- Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 49–62.
<https://doi.org/10.32630/SUKOWATI.V5I1.212>
- Hakim, L., Mutmainah, Syaipudin, L., & Chistinawati, A. D. (2025). Transparansi Sistem Laporan Keuangan pada Perusahaan IPO (Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *AKSAYA: Jurnal Rumpun Akuntansi Publik*, 1(1), 17–26.
<https://aksaya.al-anwar.id/index.php/i/article/view/3>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(2).
<https://doi.org/10.35800/JJS.V8I2.17199>
- Nugroho, O. A., & Apatya, Y. A. (2023). Rancang Bangun Desain dan Evaluasi Robot Cleaner Solar Photovoltaics Menggunakan Komunikasi Nirkabel Berbasis Komunikasi Radio Frekuensi: Robot Cleaner Solar Photovoltaics. *Jurnal Elektro Dan Mesin Terapan*, 9(3).
- Pamela, S., Kusuma, H. E., & Safira, A. (2021). Tiga Aspek Preferensi Pengguna Coworking Space dengan Pendekatan Stated Preference: Desain, Pelayanan, dan Kualitas Lingkungan Ruang Dalam. *RUAS*, 19(2), 74–83.
<https://doi.org/10.21776/UB.RUAS.2021.019.02.7>
- Purnamaningtyas, D. Y., Widodo, W., & Istiq'faroh, N. (2024). Pelestarian Budaya Lokal: Peran Bersih Desa Dan Langen Bekso Dalam Menanamkan Cinta Tanah Air Di Desa Lengkong Kabupaten Nganjuk. *Journal of Contemporary Issues in Primary Education*, 2(2).
- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1).
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 258–280.
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1543>
- Putri, I. A. K., Awwalin, I. N., & Syaipudin, L. (2025). Analisis Kepatuhan Perusahaan dalam Penerapan PSAK No 16 Akuntansi Aset Tetap pada CV Wijaya Kusuma Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Manajemen Dan Perbankan*, 1(1), 22–30. <https://jiapmp.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/3>
- Ramadhan, P. M., & Anwar, S. (2022). Analisis Manajemen Konstruksi Pada Jembatan Cikeusal. *Jurnal Konstruksi Dan Infrastruktur*, 10(1).
<https://doi.org/10.33603/JKI.V10I1.6586>

- Setyobakti, M. H., Widya, S., Lumajang, G., & Murniati, W. (2018). Analisis Kinerja Perangkat Desa di Kabupaten Lumajang. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 8(2), 124–132. <https://doi.org/10.30741/WIGA.V8I2.316>
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.21107/INFESTASI.V17I1.9932>
- Syaipudin, L. (2019). Efektifitas Media Komunikasi di Tengah Pandemi: Respon Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(2), 165–178.
- Syaipudin, L. (2023). Contribution Of Young Entrepreneurs In Building The Creative Economy Of Village Communities. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(1), 80–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v12i1.1125>
- Syaipudin, L. (2025). *Pengantar Penelitian Lapangan Sederhana Berbasis Jurnalistik (Kualitatif, Kuantitatif, R&D dan Studi Kepustakaan)*. Dawarmiyata Press LPPM STIE Al-Anwar.
- Syaipudin, L., & Awwalin, I. N. (2022). Strategi Promosi Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Penjualan pada Home Industry Baso Aci Mahira Lamongan. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 1(01), 31–42. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/smb/article/view/22>
- Syaipudin, L., & Luthfi, A. (2025). Pengaruh Financing to Debt Ratio dan Net Profit Margin terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Manajemen Dan Perbankan*, 1(1), 10–21. <https://jiapmp.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/2>
- Yanto, M., Putri, D. A. A., Elvina, E., Melisa, M., Fauzi, F., & Saputra, N. C. Salihi. (2023). Penerapan Sak-Emkm Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Toko Tjoang Bung Kota Tanjungpinang. *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 55–59.